

**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Mei 2020/Khusus - Awal Menjabat)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
**UNIT KERJA** : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
**SUB UNIT KERJA** : BIDANG PERIKANAN TANGKAP

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : AHMAD SAHWAN S
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 752073

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 86.960.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m<sup>2</sup>/36 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. Tanah Seluas 7392 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp. 36.960.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 25.250.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 17.250.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 112.750.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 10.099.776**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 235.059.776

**III. HUTANG** Rp. 39.424.942**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 195.634.834

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **31 Agustus 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.